

02 GOVERNMENTODAY
Kejutan! BI Rate Tiba-tiba
Dipangkas Jadi 5,75%**04 NUSANTARA**
Erupsi Lagi, Gunung Ibu
Naik Status 'Awat'**08 FAMILY**
Amankah Biji Pohon Ek
Dimakan Manusia?

Status Gunung Ibu Naik ke Level Awat

Gunung Ibu mengeluarkan abu vulkanik dari kawah gunung terlihat dari Desa Duono, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu(15/1/2025). Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) erupsi Gunung Ibu, tinggi kolom abu mencapai 4.000 meter di atas puncak atau 5.325 di atas permukaan laut. Statusnya naik dari level III Siaga ke level IV Awat. Berita terkait halaman 4. (ist. antara)

Kepala Daerah Tak Bersengketa Dilantik Dulu, Langgar Aturan?

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) diharapkan tetap melantik kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan jadwal ditetapkan. Artinya akan ada beberapa gelombang pelantikan. Pelantikan dibuat serentak untuk yang tidak bersengketa sesuai perpres yang ada, pada 7 Februari 2024 untuk gubernur dan 10 Februari 2025 untuk bupati/wali kota. Sementara untuk yang bersengketa baru dilaksanakan sekitar 12 Maret 2025 setelah gugatan selesai disidangkan dan berkekuatan hukum. Opsi lain, semua pelantikan dilakukan pada 13 Maret 2025, menunggu seluruh sengketa diselesaikan. Opsi-opsi tersebut diusulkan para anggota DPR RI dan masih akan dibahas dengan pemerintah. Sebelumnya, akademisi mengingatkan sesuai putusan MK, pelantikan wajib dilakukan serentak. MK mengecualikan pelantikan serentak bagi daerah yang melaksanakan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan MK dalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serta faktor force majeure sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi apakah melanggar aturan bila pelantikan tidak serentak?

Baca Hal 11....

PAYUNG HUKUM PELANTIKAN KEPALA DAERAH HASIL PILKADA 2024

- Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih serta wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.
- Putusan MK Nokor 46/2024 menyatakan, bahwa pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum, kecuali yang akan melaksanakan PSU, perhitungan suara ulang atau pengulangan pilkada karena adanya keadaan force majeure.

Mendadak Mencabut Gugatannya dari MK

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi pada tanggal 13 Januari 2025 tanpa alasan yang jelas.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 1 Willy Midel Yoseph-Habib Ismail Bin Yahya menarik Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur (PHPU Gub) Kalimantan Tengah pada Kamis 9 Januari 2024.

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara La Ode Muh Ihsan Taufik Ridwan telah mencabut gugatan sengketa pemilu. Sementara Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Tina Nur Alam tetap melanjutkan gugatan di MK.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Nomor Urut 2 Elly Engelbert Lasut dan Hanny Joost Pajouw mencabut permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 pada 13 Januari 2025.

Lanjut di hal 11...

Kejutan! BI Rate Tiba-tiba Dipangkas Jadi 5,75%

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan, menurunkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama 14-15 Januari 2025.

Sementara itu, suku bunga Deposit Facility sebesar 5%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50%.

"Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 14-15 Januari 2025 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025)

Hal ini disebutkan mengejutkan karena Konsensus CNBC Indonesia yang dihimpun dari 15 lembaga/institusi secara absolut memproyeksikan bahwa BI akan kembali menahan suku bunganya di level 6%. Indikatornya rupiah yang kini dalam tekanan berat terhadap dolar AS.

"Keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, terjaganya fundamental inflasi dan perlunya upaya untuk terus dorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry.

"Ke depan BI akan terus arahkan kebijakan moneter untuk jaga inflasi dalam sasarnya dan nilai tukar yang fundamental dengan tetap cermati ruang untuk turut dorong pertumbuhan ekonomi sesuai dinamika yang terjadi," terangnya.

Sebetulnya juga ada beberapa ekonom yang tak terkejut dengan keputusan BI, di antaranya ialah Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman. Ia mengatakan, sebetulnya ruang keputusan pemangkasan suku bunga acuan oleh dewan gubernur BI itu telah terbuka sejak Desember 2024.

"Keputusan BI dalam RDG bulan Januari 2025 untuk memotong BI-rate sebesar 25 bps ke 5,75% tidak terlalu mengejutkan. Karena sebenarnya ruang pemotongan sudah ada sejak Desember 2024 seperti penjelasan kami bulan Desember lalu," tutur Faisal.

Meski nilai tukar rupiah memang cenderung melemah bulan Januari 2025 ini, namun Faisal mengingatkan, permasalahan tekanan kurs ini merupakan fenomena global, karena dolar AS menguat hampir ke semua mata uang dunia, seiring dengan ketidakpastian global yang tetap berlangsung. BI pun menganggap tekanan kurs ini sudah mulai dapat terukur dan terkendali.

Yang menjadi masalah adalah risiko pada sisi pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 menurutnya



Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo (tengah) saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Januari 2025 dengan Cakupan Triwulanan pada Rabu (15/1/2025). (REUTERS)

kemungkinan akan tertekan baik dari faktor dalam maupun luar negeri. Dari luar negeri, risiko Trade War akibat Trump 2.0 akan berisiko menurunkan kinerja ekspor Indonesia.

Sementara itu, dari dalam negeri, risiko pelemahan tingkat permintaan akan berlanjut, seperti yang terindikasi dari inflasi yang sangat rendah mendekati batas bawah target sasaran, yang menunjukkan lemahnya tingkat permintaan.

"Jadi langkah BI ini sebenarnya sudah sesuai dengan view kami sebelumnya, namun pemotongan di Desember tertunda ke Januari," ucap Faisal.

Rupiah Langsung Tertekan

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpantau ambruk ke zona merah, usai Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan alias BI rate sebesar 25 bps menjadi 5,75%. Rabu (15/1/2025) kurs rupiah terpantau melemah 55,5 poin atau 0,34% menjadi Rp16.325 per dolar AS.

Keterpurukan kurs rupiah juga terpantau dalam data JISDOR BI hari ini. Nilai rupiah tercatat jatuh ke Rp16.311/USD dibandingkan sesi sebelumnya pada posisi Rp16.265 per dolar AS.

Hal ini juga sejalan dengan sentimen global dan domestik. Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah ini juga disebabkan oleh sentimen eksternal yaitu para pelaku pasar dengan hati-hati menunggu laporan indeks harga konsumen AS dan juga mencermati data ekonomi dengan saksama untuk melihat apakah data tersebut mendukung sikap hati-hati Fed terhadap suku bunga.

Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,34% di angka Rp16.315/US\$ pada hari ini, Rabu (15/1/2025). Hal ini berbanding terbalik dengan posisi kemarin (14/1/2025) yang menguat 0,06%.

Kepala Ekonom Bank Central Asia

(BCA) David Sumual menjadi salah satu ekonom yang mengaku terkejut dengan keputusan dewan gubernur BI hari ini. Ia mengungkapkan, ini karena kurs rupiah saat ini tengah tertekan, meskipun dari sisi tekanan inflasi sangat terkendali.

"Iya ini unexpected. Dari segi inflasi memang sangat terkendali, sehingga ada ruang untuk dorong pertumbuhan. Tapi, memang kurs juga agak tertekan," tegas David Rabu (15/1/2025).

Meski begitu, David mengakui untuk menghadapi tekanan kurs saat ini, BI memiliki banyak senjata, di antaranya ialah melalui instrumen operasi moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang memiliki suku bunga atau imbal hasil sangat cukup menarik. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan per 10 Januari 2025 di level 7,06%; 7,10%; dan 7,23%.

"Jadi BI tampaknya akan mencoba jaga attractiveness Rupiah via SRBI rate yang relatif menarik," tegas David.

Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo juga menjadi salah satu ekonom yang mengungkapkan keterkejutannya. Namun, ia menitikberatkan bahwa kebijakan pemangkasan BI Rate ini dilakukan saat surat berharga di dalam negeri tengah dalam posisi tertekan.

Sebagaimana diketahui, pada pekan kedua Januari 2025, berdasarkan catatan Bank Indonesia, pasar SBN Indonesia mulai bergejolak, karena para investor mulai melakukan aksi jual neto sebesar Rp 2,9 triliun, padahal pada pekan pertama Januari 2025 masih tercatat beli neto Rp 1,94 triliun.

"Jadi timingnya cukup surprising, mengingat ada tekanan ke surat berharga dalam negeri. Upside nya memang masih ada ruang karena Fed Fund Rate (suku bunga Bank Sentral AS) dan BI rate ada gap 1,5%, dan ini membantu mengurangi beban utang pemerintah," ucap Banjaran.

Kendati demikian, Banjaran

BI Rate Turun Jadi 5,75 Persen

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) tanggal 14-15 Januari 2025.

Hal ini mempertimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental ekonomi dan perlunya pertumbuhan ekonomi.

Suku bunga Deposit Facility juga diturunkan sebesar 25 basis poin menjadi 5%, sedangkan suku bunga Lending Facility turun ke level 6,5%.

Penurunan ini konsisten dengan inflasi yang terkendali dalam target 2,5±1 persen untuk tahun 2025 dan 2026.

mengakui, keputusan penurunan BI Rate tersebut sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah pada Januari 2025 yang lebih rendah dibandingkan pelemahan nilai tukar negara yang memiliki kapasitas ekonomi setara dengan Indonesia.

BI pun mencatat nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Januari 2025 (hingga 14 Januari 2025) hanya melemah sebesar 1,00% (ptp) dari level nilai tukar akhir 2024. Perbandingan ini relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti rupee India, peso Filipina, dan baht Thailand yang masing-masing melemah sebesar 1,20%; 1,33%; dan 1,92%.

"Keputusan tersebut juga didorong oleh tetap rendahnya perkiraan inflasi pada 2025 dan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ucap Banjaran.

Presiden terpilih Donald Trump yang akan memulai masa jabatan kedua minggu depan, fokus telah tertuju pada kebijakannya yang menurut para analis akan meningkatkan pertumbuhan dan tekanan harga. Ancaman tarif bersama dengan lebih sedikit penurunan suku bunga Fed yang diperkirakan telah mengangkat imbal hasil Treasury dan mendukung dolar AS.

Di sisi lain, Presiden Korea Selatan, Yoon ditangkap karena darurat militer Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol ditangkap pada hari Rabu atas upayanya yang gagal untuk menegakkan hukum militer pada akhir tahun 2024, menurut laporan media lokal.(wid,rls,ant/dya)

DPD Usul Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Istana: Memalukan Itu

JAKARTA-Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Bachtiar Najamudin, menyarankan biaya makan bergizi gratis dibiayai dari dana zakat dan sedekah. Istana pun langsung bereaksi dengan mengatakan hal itu memalukan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Terpisah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad mengungkapkan, pihaknya tak masalah kalau pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibantu dari zakat. Kendati begitu, ia menekankan, sasaran penerima MBG adalah golongan asnaf.

Yang termasuk ke dalam asnaf antara lain fakir miskin, amil, mualaf, gharim, Ibnu Sabil, riqab, dan fisabilillah.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," kata Noor di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Menurutnya, Baznas jauh sebelum adanya program MBG, sudah wajib menyalurkan zakat kepada mereka yang membutuhkan.

"Tanpa melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk itu.



(Ilustrasi) Program makan bergizi gratis di salah satu sekolah Kota Surabaya. (Dok.HumasSby)

Bahkan selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Baznas. Di mana saja, pasti ada," katanya.

Senada, Ketua MUI Bidang Dakwah Cholil Nafis mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil, Rabu (15/1/2025).

Hal serupa juga disampaikan Ketua Baznas Noor Achmad, ia menjelaskan secara syariah sudah cukup jelas bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan Asnaf (penerima).

DPD Mengkritisi

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir merespons usulan DPD RI soal dana zakat digunakan untuk membantu program makan bergizi gratis.

Menurutnya, usulan tersebut harus dikaji lebih lanjut lantaran dana zakat biasanya ditujukan untuk perorangan.

"Kadang-kadang orang zakat misalnya, saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umroh misalnya karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu, kan enggak mungkin peruntukkan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," ujar Adies di Grha Beta MKGR, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan jenis anggaran yang akan dipakai untuk program tersebut. Yakni, Prabowo tidak mengambil anggaran zakat untuk mendanai programnya.

"Sudahlah, pemerintah ini sudah

mempelajari dengan baik dan pemerintah tentunya, Pak Presiden memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana," tuturnya.

Adies mengatakan dirinya kurang setuju jika uang zakat digunakan untuk program makan bergizi gratis. Namun, dirinya tidak akan menolak jika ada pihak yang ingin menzakatkan hartanya untuk program itu.

"Saya pribadi, zakat itu kan mesti, sudah ada peruntukannya dan itu habluminallah bukan habluminannas. Jadi ya mungkin peruntukan-peruntukan yang diniatkan ya itu biarkan mereka berjalan," tegasnya.

"Kecuali ada orang ingin menzakatkan, ini saya zakatkan untuk makan bergizi gratis di SD (Sekolah Dasar)," tambah Adies.

Meski demikian, Adies meminta pemerintah untuk berhati-hati jika ingin menggunakan uang zakat untuk programnya. Sebab, belum ada aturan secara tertulis.

"Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa," tandas dia.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPD/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

ANGGARAN PENDIDIKAN 2019-2025

2025 (RAPBN 2025)

722.6 T

2024 (OUTLOOK)

583.1 T

2023

513.4 T

2022

480.3 T

2021

479.6 T

2020

473.7 T

2019

460.3 T

Sumber : Nota Keuangan RAPBN 2025 (Rupiah)

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya. (din, ist, wid, ant/dya)

Erupsi Lagi, Gunung Ibu Naik Status 'Awat'

Warga Diimbau Jauhi Radius 4 Km

HALMAHERA BARAT-Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, kembali erupsi pada Rabu pagi, 15 Januari 2025. Ketinggian kolom abu mencapai 4.000 meter di atas permukaan puncak gunung. Warga pun diimbau waspada dan tidak mendekati kawah gunung dalam radius 4 hingga 6 Km.

Erupsi tercatat terjadi sekitar pukul 07.11 WIT. Letusan Gunung Ibu menghembuskan material vulkanik setinggi 4.000 ribu di atas permukaan puncak gunung.

Berdasarkan laporan pos pengamatan gunung api Ibu, erupsi ini berdurasi kurang lebih 2 menit 11 detik, dengan amplitudo 28 mm. Sementara itu kolom abu teramati berwarna kelabu, condong mengarah ke barat dan barat laut.

Saat letusan terjadi, suara gemuruh terdengar hingga ke pos pengamatan dan permukiman warga. Per hari ini, Gunung Ibu telah mengalami lebih dari tujuh kali letusan, dengan ketinggian kolom abu mulai dari 800 hingga 4.000 meter.

Warga diimbau selalu menggunakan masker saat beraktivitas dan tidak mendekati radius 4 hingga 6 km dari kawah gunung, karena saat ini Gunung Ibu berada pada level 3 atau siaga.



Sejumlah pelajar melintasi jalan umum yang tertutup abu vulkanik dampak erupsi Gunung Ibu di Desa Tobaro, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Rabu (15/1/2025). (ist.antara)

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun telah meningkatkan status aktivitas Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara dari Siaga menjadi Awat atau level IV pada Rabu (15/1/2025) siang.

Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid mengatakan peningkatan status Gunung Ibu dilakukan setelah terdeteksi adanya peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan pada periode 1-14 Januari 2025.

Pos pengamatan Gunung Ibu di Desa Gam Ici, Halmahera Barat,

mencatat kejadian erupsi mencapai rata-rata 70 kejadian per hari. Pada periode Januari 2025 ketinggian kolom erupsi fluktuatif dan teramati gejala peningkatan tinggi kolom erupsi menjadi maksimal empat kilometer dari atas puncak.

Pada rentang waktu tersebut total ada sebanyak 748 kali gempa letusan, 70 kali gempa guguran, 1.643 gempa hembusan, 6.976 kali gempa vulkanik dangkal, 346 kali gempa vulkanik dalam, 60 kali gempa tektonik lokal, dengan amplitudo dominan 3 milimeter di Gunung Ibu.

Menurutnya, erupsi eksplosif berlangsung tidak menerus, tapi pada saat tidak terjadi erupsi pengamatan visual Gunung Ibu terlihat jelas hingga tertutup kabut.

Teramati asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang dengan tinggi sekitar 100-400 meter dari puncak dan cuaca cerah hingga hujan dengan angin dari arah utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut.

"Puncaknya hingga 15 Januari 2025 terjadi lima kali kejadian erupsi Gunung Ibu dengan kolom erupsi yang cenderung lebih tinggi dan lebih besar dibandingkan biasanya itu," kata Wafid. Badan Geologi tetap mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Ibu maupun wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius lima kilometer dan perluasan sektoral berjarak enam kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

Begitupun jika terjadi hujan abu, masyarakat dan wisatawan diharapkan selalu memakai masker atau penutup hidung-mulut untuk menghindari bahaya gangguan sistem pernafasan, dan mematuhi panduan dari pemerintah daerah setempat. (wid, ant, ist, dya)

Tingkat Kemiskinan RI Terendah Sepanjang Sejarah, tapi Makin Timpang

JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2024 mencapai angka 8,57 persen dari total populasi masyarakat Indonesia. Angka ini merupakan terendah sepanjang sejarah sejak BPS mulai mengumumkan data kemiskinan pada tahun 1960. Sayangnya tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan gini ratio justru mengalami sedikit kenaikan.

"Ini pertama kalinya kita menyentuh digit depannya 8 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang belum pernah sebelumnya," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widayanti dalam

konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Rabu (15/1/2025).

BPS mencatat, persentase penduduk miskin pada September 2024 menurun sebesar 0,46 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang berada di angka 9,03 persen. Jika dibandingkan dengan Maret 2023, persentase tersebut turun lebih tajam sebesar 0,79 persen poin.

Dari sisi jumlah, penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang. Angka ini berkurang 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024 dan berkurang 1,84 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2023.

Amalia menjelaskan, penurunan

angka kemiskinan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen.

"Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen," ujar Amalia

Namun, di tengah capaian positif ini, tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan gini ratio justru mengalami sedikit kenaikan. Pada September 2024, gini ratio tercatat sebesar 0,381, naik 0,002 poin dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,379.

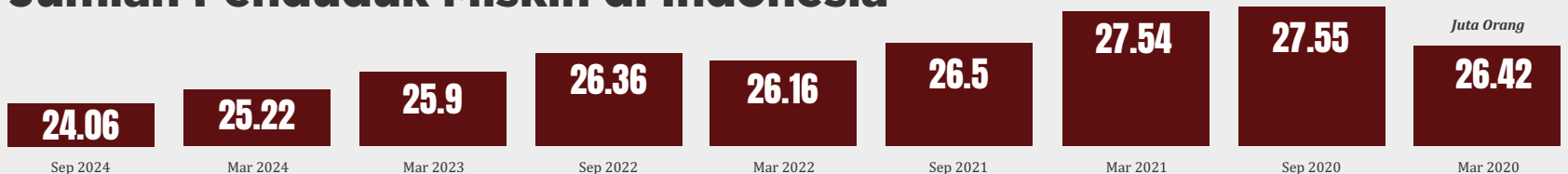
"Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,402; naik dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,399. Namun, di daerah pedesaan, gini ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,308 naik dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,306," jelas Amalia.

Meski demikian, Amalia mencatat adanya tren penurunan gini ratio di Jakarta dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan catatannya, selama satu dekade gini ratio Jakarta pada September 2024 sebesar 0,431.

"Tren gini ratio menurun ini kita bandingkan dari September 2014 terus sampai dengan September 2024," imbuhnya. (wid, rls, dya)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia



Polemik Pagar Laut di Bekasi Meski Milik Pemprov Jabar Tetap Disegel

KKP memasang segel di pagar laut di Kampung Paljaya, Jembatan Cinta, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Rabu (15/1/2025).ist



JAKARTA- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini melakukan penyegelan terhadap pagar bambu yang didirikan di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Penyegelan ini berlangsung pada Rabu (15/1/2025), melibatkan puluhan pegawai KKP dan disaksikan oleh nelayan setempat.

Meskipun proyek ini diklaim sebagai bagian dari pembangunan alur pelabuhan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), penyegelan ini menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut di Bekasi karena kegiatan itu tidak dilengkapi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Iya, sudah kami segel. Alasannya karena tidak ada PKKPRL nya," ujar Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto Rabu (15/1/2025).

Penyegelan pagar laut di Bekasi ini dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. "Penyegelan sebagai bentuk paksaan pemerintah, tidak ada batas waktunya. Kami akan lanjut pemeriksaan," kata dia.

Di sisi lain, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan,

Halid Yusuf mengatakan, pihaknya akan menginvestigasi penyegelan yang terjadi di wilayah laut Jawa Barat.

Halid menjelaskan, meski pelaku usaha telah mengantongi izin dari pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran yang terjadi. "Kita akan pastikan apakah pelaku usaha itu melenceng dari perizinan yang dilakukan atau tidak. Orang yang izin belum tentu juga tidak melanggar. Bisa jadi dia ada penambahan tanpa sepengetahuan pemda, itu yang kita investigasi," kata Halid di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (15/1/2025).

Dia menegaskan, pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut merupakan tanggung jawab KKP. "Hampir sama, kalau pemanfaatan ruang laut itu wilayah KKP," kata dia.

Penyegelan yang dilakukan oleh KKP ditandai dengan pemasangan spanduk berwarna merah yang bertuliskan "penghentian kegiatan peragaban laut tanpa izin" di sepanjang tiang bambu yang terpasang di kawasan tersebut.

Selain itu, di area reklamasi yang tidak jauh dari pagar bambu, dipasang spanduk bertuliskan "penghentian kegiatan reklamasi tanpa PKKPRL".

Kedua spanduk ini memperjelas bahwa proyek yang sedang berlangsung tidak mematuhi prosedur

perizinan yang berlaku. Tayum, seorang nelayan yang berada di lokasi saat penyegelan, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sudah dihentikan sejak pukul 12.00 WIB.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan pagar bambu tersebut memang sudah cukup lama menimbulkan tanda tanya. "Iya, sudah disegel tadi jam 12.00 WIB," ujar Tayum.

Pagar bambu yang disegel tersebut telah berdiri sejak enam bulan lalu. Keberadaannya menimbulkan kebingungan di kalangan nelayan setempat yang tidak mengetahui tujuan pasti dari pemasangan ribuan batang bambu tersebut. Sejumlah nelayan mempertanyakan apakah proyek ini sudah mendapatkan izin yang sah dari pihak berwenang.

"Kami bertanya-tanya, dan apakah sudah mendapatkan izin atau belum," kata Tayum pada Senin (13/1/2025), dua hari sebelum penyegelan dilakukan.

Pemprov Jawa Barat melalui proyek ini mengklaim bahwa pagar bambu tersebut merupakan bagian dari pembangunan alur pelabuhan. Meskipun proyek ini dikatakan untuk menata ulang kawasan pelabuhan perikanan di Tarumajaya, sejumlah pertanyaan mengenai kelengkapan izin tetap muncul.

Bahkan, pagar yang dibangun ini

Proyek pembangunan alur pelabuhan ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- Panjang alur pelabuhan: 5 kilometer
- Lebar alur: 70 meter
- Kedalaman alur: 5 meter dari permukaan air
- Luas area yang ditata ulang: 7,4 hektar
- Anggaran proyek: Rp 200 miliar
- Di sisi kiri alur pelabuhan, PT TRPN bertanggung jawab atas pengerjaan proyek, sedangkan PT Mega Agung Nusantara (MAN) mengerjakan sisi kanan.
- Alur ini dirancang untuk menjadi jalur keluar-masuk kapal nelayan, namun keberadaan pagar bambu yang menyerupai tanggul di perairan Tarumajaya ini memicu ketegangan karena dianggap menghambat akses nelayan dan tidak memiliki izin yang lengkap

Fakta Pagar Laut di Bekasi

- Pagar ini membentang sepanjang 8 kilometer di dua sudut wilayah Tarumajaya, pesisir utara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan memiliki struktur unik yang berbeda dari pagar laut di Tangerang.
- Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyebut pagar 'berbahan ribuan batang bambu di perairan Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi itu legal.
- Pemasangan bambu di perairan Kampung Paljaya legal karena hasil kerja sama antara Pemprov Jawa Barat (DKO) dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN).
- Keberadaan deretan bambu di perairan Kampung Paljaya diperuntukkan untuk pembangunan dua alur pelabuhan yang akan menjadi akses keluar dan masuknya kapal nelayan. Dua alur pelabuhan ini masing-masing dikerjakan oleh PT TRPN pada sisi kiri dan PT MAN pada sisi kanan.

dinilai sebagai struktur yang tidak memiliki kejelasan izin resmi terkait pemagaran dan reklamasi yang terjadi.

Pemprov Jawa Barat sendiri mengungkapkan bahwa proyek ini melibatkan kerja sama dengan dua perusahaan, yakni PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) dan PT Mega Agung Nusantara (MAN), untuk membangun alur pelabuhan di kawasan tersebut. Proyek ini bahkan diklaim telah dimulai sejak Juni 2023 dengan tujuan menata kawasan pelabuhan perikanan. (wid, rls, ist/ dya)

BPBD Kabupaten Malang Siaga di 4 Kecamatan Rawan Bencana

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang siaga menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung hingga Februari 2025. Disirikan pos lapangan (poslap) di 4 kecamatan rawan bencana.



Sudah sejak 3 Desember 2024 lalu, kami telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Keputusan ini diambil mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi yang dapat berdampak besar pada sejumlah wilayah di Kabupaten Malang.

SADONO IRAWAN

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang,

"Sudah sejak 3 Desember 2024 lalu, kami telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Keputusan ini diambil mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh bencana hidrometeorologi yang dapat berdampak besar pada sejumlah wilayah di Kabupaten Malang," ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Rabu (15/1/2025).

Dampak bencana hidrometeorologi diantaranya hujan deras, longsor, dan banjir yang sering terjadi pada puncak musim penghujan.

Sadono mengungkapkan, pihaknya telah mendirikan poslap di 4 wilayah yang memiliki potensi rawan bencana. Poslap tersebut tersebar di kecamatan Ngantang, Singosari, Tumpang, dan Tirtoyudo.

Menurutnya, masing-masing poslap memiliki peran vital dalam memonitor kondisi wilayah serta memberikan respons cepat terhadap setiap kejadian bencana yang terjadi.

"Setiap poslap memiliki tugas untuk memonitor wilayah masing-masing, berkoordinasi dengan muspika, serta memberikan respons cepat terhadap laporan bencana," jelas Sadono.

Poslap Ngantang, sambungnya, mencakup wilayah Pujon, Ngantang,

dan Kasembon. Sementara untuk Poslap Singosari melayani daerah Lawang, Singosari, Karangploso, dan Dau. Sedangkan untuk Poslap Tumpang bertanggung jawab atas Kecamatan Jabung, Pakis, Tumpang, dan Puncoksumo. Adapun Poslap Tirtoyudo mengawasi wilayah Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, dan Turen.

"Selain mendirikan poslap, kami juga mengoperasikan posko induk yang terletak di Kantor BPBD Kabupaten Malang. Posko induk ini beroperasi 24 jam setiap hari dan akan terus berlanjut hingga Maret 2025.

"Posko induk kami siap mendukung operasional poslap dengan segala sumber daya yang diperlukan untuk penanggulangan bencana," tambahnya.

Di sisi lain, Sadono juga mengungkapkan sejumlah peristiwa bencana yang terjadi selama dua pekan pertama di Januari 2025 ini. Antara lain yakni hujan deras yang menyebabkan kerusakan atap gedung SDN 4 Lebakhirjo di Kecamatan



Kejadian pohon tumbang dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Rabu (15/1/2025). (dok. Pusdalops BPBD Kab Malang)

Ampelgading pada 4 Januari 2025, pohon tumbang akibat longsor di Dusun Dadapan, Kecamatan Pujon pada 5 Januari 2025, serta banjir yang merendam kawasan Bululawang pada 6 Januari 2025.

Selain itu, pada 8 Januari 2025, sebuah tebing longsor setinggi 12 meter sempat menyebabkan terputusnya aliran pipa PDAM di Kecamatan Lawang, dan tanah longsor kembali terjadi pada 9 Januari yang merusak tembok rumah warga dengan kerugian ditaksir mencapai Rp 5 juta. (Santi/Dya)

Kota Malang Targetkan Zero Kasus Anak Tidak Sekolah: Verifikasi 2.376 Data Dikebut

Ilustrasi siswa siswi di SDN 3 Lowokwaru Kota Malang saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. (dok. SDN 3 Lowokwaru)



MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengejar target zero kasus Anak Tidak Sekolah (ATS). Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menginstruksikan percepatan verifikasi 2.376 data ATS yang hingga kini belum terkonfirmasi.

ATS di Kota Malang," ujar Iwan, Rabu (15/1/2025).

Diketahui, berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, sejak Oktober 2024 tercatat 5.534 kasus

Langkah ini bertujuan agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, sekaligus memastikan seluruh anak di Kota Malang kembali mendapatkan akses pendidikan.

"Saya mengapresiasi komitmen dan progres kinerja Satgas penanganan ATS. Dari yang semula lima ribu lebih ATS kini berhasil turun menjadi 3.468 orang. Tetapi, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Kita harus tetap konsisten hingga mencapai zero

ATS. Hingga kini, sebanyak 3.468 anak telah tertangani, dengan 1.092 ATS berhasil diverifikasi terkait alasan mereka tidak bersekolah.

Iwan menjelaskan, mayoritas anak yang masuk dalam kategori ATS tidak melanjutkan sekolah karena alasan bekerja, keengganan bersekolah, dan faktor lainnya. Sementara itu, 2.376 anak sisanya masih belum terverifikasi dan tidak diketahui alasan mereka putus sekolah.

"Kami akan mengagendakan pertemuan dengan Kemenag maupun Cabang Dinas Pendidikan untuk melaporkan progress dan keterangan terkait 2.376 anak tersebut. Dengan data yang tepat, kita bisa melakukan identifikasi secara akurat. Nanti intervensi yang dilakukan juga bisa tepat dan terukur," tegas Iwan.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk menuntaskan persoalan ATS. Ia menyebutkan, sinergi antara Disdikbud, Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM), Kemenag, dan Cabang Dinas Pendidikan harus diperkuat.

"Saya juga meminta bantuan Camat dan Lurah saya harapkan bisa mengadvokasi, turun tangan. Mengingat mereka memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam berkomunikasi dengan keluarga atau anak-anak yang putus sekolah," paparnya.

Iwan juga menegaskan, komitmen terhadap pendidikan menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya sebagai Pj Wali Kota Malang. Ia memastikan semua langkah intervensi yang dilakukan tetap sejalan dengan kebijakan mandatory spending untuk pendidikan.

"Saya tekankan, tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Berbagai intervensi akan kami upayakan untuk mendorong mereka agar kembali bersekolah. Saya pastikan langkah ini sejalan dengan komitmen Pemkot Malang dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik," pungkasnya. (Santi/Dya)

Kebakaran Hutan di Los Angeles: 25 Tewas dalam 8 Hari

WASHINGTON - Kebakaran hutan yang menerjang wilayah Los Angeles County di California, AS, telah merenggut nyawa 25 orang hingga hari ke-8.

Angka kematian itu dikonfirmasi oleh Kantor Pemeriksa Medis Los Angeles County pada Selasa (14/1/2025).

Dari 25 korban jiwa, sembilan tercatat di kawasan Palisades dan 16 lainnya di Eaton.

Kebakaran tersebut, yang meliputi kebakaran Palisades dan Eaton, telah merenggut masing-masing 9 dan 16 jiwa.

Dinas Cuaca Nasional (NWS) meminta warga mewaspadaikan angin kencang yang diperkirakan terjadi pada Selasa malam hingga Rabu (15/1/2025).

"Angin hari ini lebih lemah dari perkiraan, tetapi kemungkinan akan menguat lagi malam ini dan Rabu. Kita belum sepenuhnya aman," kata NWS.

Dinas itu menambahkan bahwa peringatan darurat masih diberlakukan.

"Tetap waspada lingkungan di sekitar Anda," kata NWS Los Angeles.

Menurut Dinas Pemadam Kebakaran California (Cal Fire), kebakaran di Eaton dan Palisades kini menjadi kebakaran hutan paling merusak dalam sejarah California Selatan.

Kebakaran yang terjadi di kawasan Palisades, Eaton, dan Hurst itu telah melalap sekitar 60 mil persegi lahan, atau melebihi luas Paris.

Hingga Selasa malam, kebakaran di Palisades telah menghancurkan lebih dari 23.700 hektare lahan dan yang berhasil dikendalikan baru 18 persen.

Kebakaran di Eaton telah meludeskan 14.117 hektare lahan dan baru 35 persen di antaranya bisa



Gubernur California Gavin Newsom mengatakan bahwa lebih dari 1400 petugas pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk mengatasi kebakaran yang "belum pernah terjadi sebelumnya". (MediaNewsGroup)

dipadamkan.

Di Ventura County, api di kawasan Auto telah dikendalikan hingga 47 persen, sementara api di kawasan Hurst di utara Los Angeles hampir sepenuhnya bisa dipadamkan dengan tingkat penanganan 97 persen.

Robert Fenton, administrator regional FEMA Wilayah 9, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima lebih dari 40.000 permohonan bantuan dari orang-orang yang terdampak kebakaran hutan California.

Pernyataannya itu muncul setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa warga yang terdampak akan menerima satu kali bantuan senilai 770 dolar AS (sekitar Rp12,5 juta).

Diketahui hampir 40 orang ditangkap di kawasan-kawasan permukiman Los Angeles County yang dilanda kebakaran hutan, kata penegak hukum setempat pada Selasa (14/1/2025).

"Saat ini, 39 orang ditangkap. Di kawasan Eaton 33 orang, di Palisades enam orang," kata Sheriff Robert Luna dalam konferensi pers.

Dari jumlah tersebut, kata dia, sembilan orang ditangkap karena melanggar jam malam, dua orang karena menerbangkan drone, dan 11 lainnya ditangkap karena terlibat pencurian di Eaton.

Dari enam orang yang ditangkap di Palisades, tiga di antaranya karena melanggar jam malam dan tiga lainnya karena mencuri.

Luna mengingatkan bahwa jam malam di kawasan-kawasan yang mendapat perintah

evakuasi tetap berlaku dari pukul 18.00 hingga 06.00 waktu setempat.

"Kami tak hanya fokus pada pelaku pencurian dan penjarahan di jalanan, tetapi juga pada siapa pun yang terlibat dalam berbagai penipuan," katanya, menambahkan.

Sekitar 88.000 penduduk saat ini berada di bawah perintah evakuasi di Los Angeles County, sementara lebih dari 84.000 lainnya menerima peringatan evakuasi, menurut sang sheriff.

Luna juga mengungkapkan bahwa departemennya sedang menangani 24 kasus orang hilang.

"Sebanyak 18 kasus di kawasan Eaton dan enam di kawasan Malibu," ujarnya, seraya menambahkan bahwa semua yang dilaporkan hilang adalah orang dewasa.

Sementara itu, pihak berwenang memperingatkan warga di kawasan Palisades untuk bersiap mengungsi karena angin kencang diperkirakan akan terjadi dalam 24 jam ke depan. Angin kencang bisa menimbulkan kebakaran baru yang ekstrem.

Petugas damkar terus bekerja tanpa henti untuk mengendalikan api di California Selatan yang kini memasuki hari ke-8.

Jumlah WNI Terdampak Naik

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles menyebut telah terjadi kenaikan jumlah WNI yang melapor terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

"Sejauh ini terdata 163 WNI, baik masyarakat diaspora maupun pelajar, yang terdampak kebakaran hutan," kata Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Los Angeles Afina Burhanuddin saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dari jumlah sebelumnya yang dilaporkan pada Sabtu (11/1/2025) sebanyak 97 orang. Para WNI yang terdampak dilaporkan menetap di wilayah Pasadena, Altadena, Sylmar, dan Calabasas.

Menurut Afina, kondisi cuaca di Los Angeles masih belum kondusif mengingat angin Santa Ana, yang menjadi salah satu faktor pemburukan karhutla di Los Angeles, diperkirakan masih akan muncul malam ini hingga Kamis siang waktu setempat.

"Diperkirakan Sabtu (18/1/2025) baru akan ada hujan gerimis," ujarnya.

Sementara itu, sebagian besar WNI yang terdampak dilaporkan mengungsi ke pusat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat dan terbuka bagi semua korban tanpa membedakan kewarganegaraannya.

Ada pula WNI yang mengungsi di rumah saudara dan kerabat, hotel, ataupun mencari tempat tinggal sementara baru.

KJRI Los Angeles juga menyiapkan tempat pengungsian dan persediaan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Bagaimanapun, kami menyarankan supaya (WNI terdampak) bisa ke shelter resmi karena fasilitas di sana yang pasti lebih baik, kemudian bisa terdata dan mendapat informasi terbaru, dan pasti dapat bantuan," ucap Afina.

Dia juga menyatakan bahwa KBRI Los Angeles senantiasa mengimbau WNI untuk selalu mengikuti arahan otoritas mengingat sejumlah lokasi masih ditetapkan sebagai zona darurat oleh pemerintah setempat.

Dalam upaya meringankan beban komunitas Indonesia maupun masyarakat setempat di Los Angeles, KJRI akan menjadi tuan rumah bagi acara penggalangan dana dan doa bersama dari perwakilan berbagai agama pada Minggu (19/1/2025) waktu setempat.

Pejabat KJRI tersebut menyatakan agenda tersebut akan terbuka bagi publik, khususnya masyarakat Indonesia di Los Angeles. Pihaknya juga tidak menetapkan target tertentu terkait jumlah peserta maupun dana yang terkumpul dalam acara itu.

Kebakaran hutan mematikan di Los Angeles yang berlangsung sejak 7 Januari 2025 melanda lebih dari 40.000 hektare lahan terbakar dan mengakibatkan sekitar 12.000 bangunan rusak. Dilaporkan korban tewas akibat bencana alam ini mencapai 25 orang per Selasa (14/1/2025). (anadolu, Antara,ist/nei)



Korban kebakaran mencari barang-barang di lokasi kebakaran rumah yang terbakar Api Eaton di Altadena. REUTERS/Fred

Amankah Biji Pohon Ek Dimakan Manusia?

BUKAN hanya makanan tupai, pakar diet mengatakan biji pohon ek aman dikonsumsi jika diolah dengan benar dan juga punya manfaat Kesehatan yang menjadikannya pilihan bernutrisi untuk dikonsumsi.

Biji pohon ek identik dengan tupai, seperti yang sering kita lihat di film kartun atak komik anak. Biji tanaman ini mungkin dipandang sebelah mana oleh manusia.

"Biji pohon ek tentu aman dikonsumsi jika diolah dengan benar dan punya manfaat kesehatan," jelas pakar diet Trista Best kepada USA TODAY.

Kuncinya adalah diolah dengan benar. Berikut yang perlu diketahui soal biji pohon ek ini.

Bisakah dimakan manusia?

Jawaban singkatnya tentu saja bisa. Namun tak seperti tupai yang bisa langsung mengeratnya, manusia perlu memasaknya dulu sebelum dimakan.

"Biji pohon ek mengandung tanin yang membuatnya tak aman dimakan dalam kondisi mentah. Rasanya pahit, bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi, dan beracun dalam jumlah yang banyak," papar Best.

Kabar baiknya, kandungan tanin bisa dihilangkan dengan cara merebus atau merendam biji pohon ek dalam air, yang membuatnya aman dikonsumsi, jelas Shelley Balls, pakar diet dan nutrisi di Consumer Health Digest, pada media yang sama.

Bisakah dicerna?

Setelah diolah dengan benar, biji pohon ek pun lebih ramah pada sistem pencernaan, kata Best. "Biji pohon ek mengandung cukup banyak serat, yang bisa membantu mengatasi sembelit, tapi bisa menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan buat yang sensitif," tambahnya.

Apa manfaatnya buat kesehatan?

Singkatnya, biji pohon ek sarat nutrisi dan antioksidan, ungkap Balls. Namun jangan terlalu banyak memakannya. Balls mengatakan sekali-sekali biji pohon ek bisa dimasukkan ke dalam pola makan.

Biji pohon ek kaya vitamin, zat gizi, dan mineral untuk membantu

mendukung kesehatan jantung, tulang, dan otot, juga baik untuk tenaga, metabolisme, dan fungsi otak, papar Best. Biji-bijian ini juga rendah indeks glikemik dengan melepaskan energi secara perlahan, yang membantu mengontrol kadar gula darah dan menjaga tenaga.

Serat pada biji pohon ek juga mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus yang membantu pencernaan dan kesehatan usus, tambahnya. Jadi, selalu ingat tips di atas jika ingin mencoba menjadi teman tupai.

Biji ek dapat meningkatkan kesehatan usus

Bakteri usus Anda sangat penting untuk kesejahteraan Anda secara keseluruhan, dan ketidakseimbangan dalam komunitas mikroba ini telah dikaitkan dengan penambahan berat badan, diabetes, dan masalah pencernaan.

Biji ek kaya akan serat, yang membantu memberi makan bakteri baik usus Anda.

Secara tradisional, masyarakat juga memanfaatkan biji ek sebagai obat alami untuk berbagai masalah pencernaan, seperti sakit perut, kembung, mual, dan diare.

Dalam sebuah penelitian yang berlangsung selama dua bulan dan melibatkan 23 orang dewasa yang menderita gangguan pencernaan,

mereka yang diberi 100 mg ekstrak biji ek mengalami lebih sedikit ketidaknyamanan perut dibandingkan dengan mereka yang menerima kapsul tepung maizena.

Namun perlu diingat, penelitian ini menggunakan ekstrak biji ek dalam bentuk pekat, jadi tidak jelas apakah mengonsumsi biji ek utuh akan memberi Anda manfaat yang sama.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami sepenuhnya bagaimana biji ek mempengaruhi pencernaan.

Biji ek kaya akan antioksidan

Antioksidan adalah zat yang melindungi sel Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh molekul tidak stabil, yang juga dikenal sebagai radikal bebas.

Studi menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan kaya antioksidan dapat membantu

menangkal masalah kesehatan jangka panjang seperti penyakit jantung, diabetes, dan beberapa jenis kanker.

Biji ek adalah gudang antioksidan, termasuk vitamin A dan E, serta berbagai zat tanaman bermanfaat lainnya.

Dalam sebuah penelitian berbasis hewan, ekstrak biji ek yang mengandung antioksidan ditemukan dapat mengurangi peradangan pada tikus yang memiliki masalah reproduksi.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kita masih memerlukan penelitian pada manusia untuk sepenuhnya memvalidasi temuan ini.

Biji ek berlimpah di alam liar. Lebih dari 450 spesies pohon ek di seluruh dunia menghasilkan biji ek, terutama di belahan bumi utara.

Dari musim gugur hingga awal musim semi, Anda sering dapat menemukan banyak biji ek matang yang tersebar di bawah pohon-pohon ini.

Mencari makan kacang-kacangan ini umumnya aman, tetapi berhati-hatilah untuk menghindari mengumpulkan kacang-kacangan yang busuk, hijau, dan mentah.

Jika Anda mengumpulkannya dari alam, biji ek bisa menjadi pilihan pangan lokal yang bebas biaya, bergizi, dan ramah lingkungan. (nei,ist/dya)



DEEPPFAKE SUARA ANCAMAN SIBER PADA 2025



Siahaan menambahkan bahwa perkembangan teknologi AI generatif tidak hanya meningkatkan kemampuan manipulasi suara tetapi juga membantu peretas menciptakan email atau pesan yang terlihat sangat meyakinkan.

Dengan email phishing yang dirancang sedemikian rupa atau deepfake suara yang menyerupai suara pimpinan atau rekan kerja, target menjadi lebih mudah terjebak.

"Itu akan lebih sulit buat para pengguna atau non IT untuk bisa lihat, oh ini bukan bohongan lho, ini email yang asli atau suara yang asli gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita lihat akan memang populer di tahun 2025," kata Arthur.

Untuk menghadapi ancaman ini, Arthur menekankan pentingnya pendekatan keamanan siber yang lebih menyeluruh.

Pendekatan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan seperti firewall tetapi memerlukan platform keamanan terpadu untuk mendeteksi ancaman dengan lebih cepat.

"Misalkan beberapa perusahaan itu hanya memikirkan, oh kalau untuk security cukup deh firewall saja, itu tidak bisa seperti itu lagi. Kita harus bicara dengan satu platform tujuannya untuk dapat mendeteksi adanya threat, ancaman. Tidak hanya mendeteksi, mendeteksi lebih cepat," ucapnya.

Selain itu, edukasi terhadap pengguna juga menjadi kunci penting dalam mencegah serangan berbasis deepfake.(nei,ist/dya)

REGIONAL Vice President Palo Alto Networks ASEAN Steven Scheurmann memprediksi bahwa deepfake berbasis suara akan menjadi ancaman siber yang signifikan pada tahun 2025.

"Mengapa kami memprediksi deepfake suara lebih menonjol dibandingkan video? Anda harus memahami peretas, pola pikir mereka seperti apa. Mereka mau menggunakan yang paling mudah untuk berkompromi, itu salah satu target. Jadi, deepfake suara adalah yang paling mudah," kata Steven dalam media briefing yang digelar daring, Selasa.

Deepfake adalah foto, video, dan

audio yang diedit atau dibuat menggunakan perangkat kecerdasan artifisial (AI).

Menurut dia, teknologi AI generatif yang semakin canggih membuat manipulasi suara jauh lebih mudah dilakukan oleh peretas. Suara seseorang dapat dengan mudah diambil dari berbagai sumber, terlebih bila individu tersebut sering tampil di hadapan publik.

Data suara itu kemudian digunakan untuk menciptakan deepfake yang sangat realistis, sehingga mempersulit target untuk membedakan mana yang asli dan palsu.

Deepfake suara dinilai lebih mudah dilakukan, dikirim, dan memberikan hasil yang diinginkan peretas, seperti keuntungan finansial melalui penipuan atau serangan ransomware.

"Saat ini, hal yang paling mudah dilakukan adalah deepfake suara. Mudah dilakukan, mudah dikirim, dan mudah mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Para peretas dapat uang, dapat membuat ransomware, mereka ingin membuat sesuatu yang mudah untuk mendapatkan hasil, dan biasanya itu uang," kata Steven.

Technical Solutions Manager Palo Alto Networks Indonesia Arthur



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Diet untuk Menjaga Kesehatan Kulit



MENJAGA kualitas kesehatan kulit ada kaitannya dengan apa yang dimakan sehari-hari, menjadikan nutrisi sebagai salah satu faktor penting di luar dari faktor paparan sinar UV, polutan dan produk perawatan kulit.

Ditulis laman Channel News Asia, Selasa (14/1/2025), konsultan dermatologis Dr. Lynn Chiam mengatakan tidak ada salahnya untuk makan makanan sehat dan menjalani diet yang kaya antioksidan dengan berbagai jenis buah dan sayur padat yang dapat membantu kulit pulih dari kerusakan akibat sinar matahari selama bertahun-tahun.

Untuk mendapatkan kulit bersih, bercahaya dan sehat, berikut adalah makanan yang harus dihindari, atau paling tidak kurangi konsumsinya.

1. Jerawat

Menurut Dr. Chiam dan Dr. Rachel Ho dari La Clinic, beberapa penelitian telah mengungkapkan hubungan antara jerawat dan konsumsi susu, khususnya susu skim karena mengandung hormon pertumbuhan, seperti IGF-1 dan faktor estrogen, yang ditemukan berkontribusi terhadap

jerawat.

Dan karena protein whey berasal dari susu sapi, protein ini juga dikaitkan secara positif dengan jerawat, jelas Dr. Ho. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah adanya hormon yang disebutkan di atas dalam whey yang dapat menyebabkan terbentuknya jerawat.

2. Tanda penuaan

Chaim mengatakan terlalu banyak gula dalam makanan memungkinkan produksi zat pemicu penuaan, yang dikenal sebagai Produk Akhir Glikasi Lanjutan (AGEs), yang merupakan faktor pemicu stres oksidatif yang terbentuk ketika lemak atau protein bercampur dengan gula.

Makanan yang menyebabkan AGE, merusak jaringan dan komponen seluler kulit, seperti kolagen dan

elastin, dan juga mengurangi proses perbaikan dan regenerasi kulit.

"Hal ini membuat kulit kurang elastis, lebih tipis, dan kendur," katanya.

Pada saat yang sama, pola makan tinggi lemak dan karbohidrat, seperti yang didapatkan dari makanan cepat saji, juga diketahui dapat menyebabkan stres oksidatif yang tinggi.

Pola makan seperti itu menghasilkan radikal bebas dalam jumlah tinggi yang meningkatkan stres oksidatif pada tubuh, yang juga dapat merusak DNA seluler.

3. Dermatitis (eksim dan rosacea)

Menurut Dr. Chiam, kondisi kulit rosacea dan eksem telah dikaitkan dengan perubahan mikrobioma usus, yang dapat menyebabkan peradangan, sehingga memengaruhi kondisi kulit.

Hindari makanan pedas, minuman panas, dan alkohol untuk rosacea, serta makanan yang dapat meningkatkan kadar IgE (kadar imunoglobulin E, yang merupakan jenis antibodi yang diproduksi sistem kekebalan tubuh untuk melawan alergen) seperti susu, telur, kedelai, gandum, kacang tanah, ikan, dan kerang saat menangani eksem.

4. Kulit kering dan dehidrasi

Hindari makanan dan minuman yang memiliki efek diuretik, seperti kopi, teh, dan alkohol, serta makanan tinggi sodium semisal makanan olahan seperti keju Amerika yang sudah diiris, ham, dan bacon.

Menurut Dr. Ho, alkohol, kopi, dan teh dapat meningkatkan

kehilangan air, sementara natrium menarik air keluar dari sel. Selain itu, konsumsi garam yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan hidrasi dalam tubuh, yang pada gilirannya dapat memengaruhi tingkat hidrasi sel.

5. Kulit kusam

Kulit yang kering atau mengalami dehidrasi secara alami akan terlihat kusam. Meskipun tidak ada makanan tertentu yang menyebabkan kondisi ini, Dr. Ho mengatakan bahwa makanan dan minuman yang meningkatkan dehidrasi dan melemahkan lapisan kulit dapat menyebabkan kulit kusam.

Sebagai gantinya, makan makanan yang mengandung antioksidan, yang melindungi kulit dari radikal bebas seperti bayam dan kangkung, goji berry, dan blueberry dalam pola makan yang dapat membantu melawan stres oksidatif.

Pola makan yang kaya akan asam lemak omega-3 berpotensi meningkatkan fungsi lapisan pelindung kulit dan mengurangi peradangan. Pertimbangkan untuk menambahkan makanan seperti ikan berlemak air dingin termasuk salmon, tuna, dan sarden, serta biji rami dan kenari. Chaim mengatakan kesehatan usus juga memiliki hubungan terhadap kondisi kulit, maka itu dianjurkan mengonsumsi suplemen probiotik, makanan fermentasi seperti yoghurt, dan kimchi atau kombucha.

Tambahkan juga makanan dengan warna cerah seperti tomat, paprika, wortel, ubi jalar dan brokoli untuk mengambil kandungan karotenoid yang melindungi kerusakan kulit akibat serangan matahari. Serta konsumsi vitamin A, C, dan E yang bermanfaat bagi kulit luar dan dalam.

"Mikronutrien ini diperlukan untuk mendukung fungsi kulit. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa mikronutrien ini dapat memberikan perlindungan antioksidan terhadap kerusakan akibat radikal bebas untuk menunda tanda-tanda penuaan," jelas Dr. Ho. (nei,ist/dya)



Kepala Daerah Tak ... (dari Hal 1)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) di banyak daerah telah menetapkan kepala-wakil kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tetapi, mereka belum bisa menjalankan tugas sebagai pimpinan daerah karena menanti waktu pelantikan.

MK pada akhir Juli 2024, telah menegaskan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 harus dilaksanakan serentak setelah lembaga peradilan konstitusi itu memutus sengketa hasil pilkada. Namun, ketentuan pelantikan kepala daerah serentak itu dikucualikan bagi daerah yang harus melaksanakan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Penegasan itu tertuang Putusan MK Nomor 46/PUU-XXII/2024 yang dibacakan dalam sidang perkara uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Selasa (30/7/2024), di gedung MK, Jakarta.

Artinya, pelantikan harus menunggu sengketa Pilkada 'ketok palu' di MK. Diketahui, ada 309

perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 yang teregistrasi.

Namun para legislator berharap segera ada pelantikan sesuai jadwal awal. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan ada dua opsi untuk pelaksanaan kepala daerah terpilih. Opsi pertama, pelantikan serentak yakni pelantikan yang baru bisa digelar setelah seluruh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkekuatan hukum, dilaksanakan sekitar 12 Maret 2025.

"Pelantikannya itu kita serahkan pada presiden, karena dasar hukum pelantikan itu adalah perpres," ujar Rifqi kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Kemudian, opsi kedua, Rifqi menyebut pelantikan dibuat serentak untuk yang tidak bersengketa sesuai perpres yang ada, pada 7 Februari untuk gubernur dan 10 Februari untuk bupati/wali kota.

"Dan serentak untuk mereka yang bersengketa, sesuai putusan MK, apakah mau PSU, penghitungan ulang dan seterusnya setelah nanti putusan itu kita dapatkan," katanya.

Dia menjelaskan soal dengan pelantikan kepala daerah secara serentak hasil Pemilu 2024, terdapat dilema atau problematika hukum.

"Di satu sisi, pertimbangan hukum putusan MK Nokor 46/2024 menyatakan, bahwa pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum, kecuali yang akan melaksanakan PSU, perhitungan suara ulang atau pengulangan pilkada karena adanya keadaan force major," ujarnya.

Untuk itulah, Legislator Partai NasDem mengatakan Komisi II DPR akan mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP untuk membahas itu semua.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh. Rahmat mengatakan, meski terdapat sejumlah gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi, namun tidak semua palagan mengajukan permohonan sengketa itu.

"Pelantikan patutnya dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati," kata Rahmat dalam keterangan tertulis.

Dengan adanya hasil pilkada yang tidak diajukan gugatan sengketa, kata dia, maka secara aturan kepala daerah yang telah dinyatakan sebagai pemilih suara terbanyak, harus dilantik sesuai waktu yang ditetapkan.

"Karena tidak ada persoalan hukumnya kalau harus ikut ditunda pelantikannya," ujar dia.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024, gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024 diagendakan dilantik pada 7 Februari mendatang. Sedangkan bagi bupati dan wakilnya, serta walikota

dan wakilnya, dilantik pada 10 Februari 2025.

Masalahnya, terdapat banyak gugatan sengketa hasil pilkada di Mahkamah yang baru selesai disidangkan paling lambat pada 11 Maret mendatang, sehingga berpotensi memperlambat waktu pelantikan.

Pada 10 Januari lalu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasayarakatan Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi guna membahas teknis pelantikan kepala daerah agar berjalan efisien.

Pembahasan teknis itu terkait juga dengan penyelesaian sengketa Pilkada 2024 yang masih berlangsung di MK.

"Kita saling mendiskusikan karena ini terkait dengan pelantikan kepala daerah, karena ini putusan dari Mahkamah Konstitusi, kan terkait dengan Presiden juga, dan Mensesneg yang tangani. Tapi menyangkut aspek-aspek hukum, kan saya juga harus memikirkan masalah ini," ujar Yusril.

Yusril menjelaskan pemerintah saat ini dalam posisi mendukung semua jalannya proses mengenai penetapan kepala daerah, termasuk di dalamnya perihal sengketa Pilkada 2024.

Namun, untuk daerah-daerah yang tidak mengalami kendala sengketa, dia mengatakan pemerintah mempertimbangkan kepala daerah terpilih bisa dilantik lebih dulu.

Dia juga akan berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian, DPR, dan Mahkamah untuk membahas teknis pelantikan kepala daerah agar tidak terjadi masalah di lapangan.

"Karena ada dua putusan MK yang pertimbangan hukumnya itu agak menimbulkan keragu-raguan. Apakah MK menghendaki pelantikan itu nanti serentak apabila sudah selesai sengketa, ataukah bisa dilantik yang tidak sengketa lebih dulu," kata Yusril.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri menunggu masa reses Anggota DPR usai untuk membahas bersama waktu pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak usai penyelesaian perkara gugatan sengketa pilkada di Mahkamah.

"Ketika selesai reses, maka kami akan melakukan rapat pembahasan untuk menyepakati ya, kira-kira pilihannya seperti apa, di saat ini posisinya seperti itu," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Serang, Banten.

Amanat MK Serentak

Terpisah, Kementerian Dalam Negeri menunggu masa reses Anggota DPR RI selesai untuk membahas bersama waktu pelantikan kepala daerah terpilih secara serentak usai penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika selesai reses, maka kami akan melakukan rapat pembahasan untuk menyepakati ya, kira-kira pilihannya seperti apa, di saat ini posisinya seperti itu," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di

Serang, Banten, Jumat (10/1/2025).

Bima menuturkan pelantikan kepala daerah sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah. Namun, kata dia, terdapat putusan MK yang isinya meminta seluruh pelantikan dilakukan serentak, kecuali yang melakukan pilkada ulang.

"Artinya, kalau mengikuti itu, maka pelantikannya itu tidak bisa di bulan Februari, karena harus menunggu dulu tahapan dari persidangan MK yang paling cepat baru akan selesai di tanggal 13 Maret," ujarnya.

Karena itu, Bima mengatakan Kemendagri akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan terutama dengan DPR setelah menunggu masa reses.

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025. Sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih serta wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, pemilihan dan pelantikan calon kepala daerah dapat diibaratkan dua sisi koin yang sama dalam proses demokrasi. Pemilihan menentukan siapa yang dipilih oleh rakyat, sementara pelantikan memberikan legitimasi hukum dan dimulainya masa jabatan bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan tugas-tugasnya.

Proses pelantikan, kata Hakim Konstitusi Saldi Isra, akan memastikan adanya stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan dan kepemimpinan. Dengan demikian, adanya suatu tahapan yang jelas untuk menggantikan pemimpin yang lama dengan yang baru akan mencegah kekosongan kekuasaan.

Dalam konteks pelaksanaan pilkada serentak 2024 sebagai desain baru dalam penataan struktur tata kelola pemerintahan secara nasional, maka pelaksanaan pemungutan suara serentak harus diikuti pelantikan secara serentak pula.

Jumlah permohonan sengketa hasil pilkada yang diregistrasi sebanyak 309 perkara dari 314 permohonan yang diajukan ke MK. Pemeriksaan 309 perkara tersebut akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme sidang panel. Setiap panel terdiri atas tiga hakim konstitusi.

Pengecualian hanya berlaku untuk daerah yang melaksanakan pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang karena adanya putusan MK dalam perkara sengketa pilkada. Selain itu, hal yang membuat pelantikan kepala daerah tidak dapat dilakukan serentak adalah faktor force majeure sesuai ketentuan perundang-undangan. (din, wid, rls, ist, ant/ dya)

MENDADAK MENCABUT GUGATANNYA DARI MK

Lanjutan dari hal 1...

Pemilihan Bupati:

- Ridwan Yasin dan Muksin Badar (Gorontalo Utara) mencabut gugatan pada 14 Januari 2025.
- Yan Ukago dan Stefanus Mote (Deiyai, Papua Tengah) menarik gugatan pada 15 Januari 2025.
- Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihah (Pangandaran) menarik permohonan PHPU pada 8 Januari 2025.
- Bayu Syahjohan dan Musyafur Rahman (Bogor) mencabut permohonan PHPU pada 8 Januari 2025.
- Alias Wello dan Muhammad Ishak (Lingga, Kepulauan Riau) permohonan dibatalkan hakim pada 8 Januari 2025.
- Gunawan Hs dan Umar Usman (Malang) mencabut permohonan PHPU pada 8 Januari 2025.
- Abdul Ghofur dan Yuhronur Efendi (Lamongan) mencabut permohonan PHPU pada 8 Januari 2025.
- Evi Susanti dan Rico Zaryan Saputra (Bengkulu Tengah) mencabut permohonan PHPU pada 8 Januari 2025.
- W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan (Klaten) mencabut gugatan pada 9 Januari 2025.
- Sahrul Sukardi dan Alamsyah Arifin (Mamuju Tengah) mencabut gugatan pada 9 Januari 2025.
- Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah dan Serfianus (Nunukan) menarik permohonan PHPU pada 9 Januari 2025.
- Alfian Mawardi dan Agati Sulie Mahyudin (Kapuas) mencabut permohonan sengketa pada 13 Januari 2025.
- Pemantau Pilbup Falfak (Saparuddin) mencabut gugatan pada 14 Januari 2025.
- Ridwan Yasin dan Muksin Badar (Gorontalo Utara) mencabut permohonan PHPU pada 14 Januari 2025.
- PPI (Sorong Selatan, Saparuddin) mencabut gugatan pada 14 Januari 2025.
- Imanuel Ekadianus Blegur dan Lukas Reiner Atabuy (Alor) mengajukan pencabutan PHPU pada 14 Januari 2025.
- Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi A. Rafiq (Depok) mencabut permohonan PHPU pada 8 Januari 2025.
- Deri Asta dan Desni Seswinari (Sawahlunto) mencabut gugatan pada 10 Januari 2025.
- Erna Rasyid Taufan dan M Rahmat Sjamu Alam (Sawahlunto) mencabut gugatan pada 10 Januari 2025.
- Nofi Candra dan Leo Murphy (Solok) membatalkan gugatan karena ketidakhadiran.

Presiden Korsel Yoon Dijebloskan ke Penjara Setelah Diinterogasi



Sejumlah pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Soek-yeol melaksanakan unjuk rasa di depan Gedung Pemerintahan, Seoul, Korea Selatan, Rabu (15/1/2025). (Afp)

SEOUL - Presiden Korea Selatan (Korsel) yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dikirim ke pusat penahanan dekat Seoul pada Rabu (15/1/2025), setelah diinterogasi oleh pejabat antikorupsi yang menahannya atas penerapan darurat militer bulan lalu.

Seperti dilansir Irish News, Yoon ditahan dalam operasi penegakan hukum besar-besaran di kompleks kepresidenan. Yoon dengan tegas bersikeras bahwa badan antikorupsi negara tersebut— yang memimpin penggerebekan bersama polisi— tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki tindakannya.

Kendati demikian, ia mengatakan bersedia kooperatif untuk mencegah kekerasan antara pendukungnya dengan aparat.

Yoon, presiden pertama di Korea Selatan yang ditangkap, kini menghadapi kemungkinan hukuman penjara yang lama atas tuduhan pemberontakan.

Dalam pesan video yang direkam sesaat sebelum dia diantar ke markas besar badan antikorupsi, Yoon menyayangkan “supremasi hukum telah runtuh sepenuhnya di negara ini.”

Yoon telah bersembunyi di kediaman Hannam-dong di ibu kota, Seoul, selama berminggu-minggu. Ia bersumpah untuk “berjuang sampai akhir” dalam upaya melawan penggulingannya.

Ia membenarkan penerapan darurat militer pada 3 Desember sebagai tindakan sah pemerintah melawan oposisi “anti-negara” yang menggunakan mayoritas legislatif untuk menggagalkan agendanya.

Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi mengatakan Yoon ditahan sekitar lima jam setelah penyelidikan

tiba di kompleks kepresidenan, dan sekitar tiga jam setelah mereka berhasil memasuki kediaman tersebut. Ini merupakan upaya kedua mereka untuk menahannya atas penerapan darurat militer.

Sederet mobil SUV berwarna hitam, sebagian dilengkapi sirene, terlihat meninggalkan kompleks kepresidenan dengan pengawalan polisi. Yoon kemudian terlihat keluar dari kendaraan setelah tiba di kantor agensi di kota terdekat, Gwacheon.

Ratusan pendukung konservatif Yoon berunjuk rasa di dekat kantor badan antikorupsi saat ia menjalani pemeriksaan. Mereka meneriakkan slogan-slogan dan memegang tanda bertuliskan: “Kami akan berjuang bersama Presiden Yoon Suk Yeol.”

Juga pada Rabu, seorang pria tak dikenal berada dalam kondisi yang mengancam jiwa setelah melakukan aksi bakar diri di dekat lokasi, menurut pemadam kebakaran provinsi Gyeonggi.

Setelah diinterogasi lebih dari 10 jam, kendaraan yang membawa Yoon tiba di pusat penahanan di Uiwang, dekat Seoul, dikawal oleh polisi dan kendaraan keamanan presiden.

Bisa Dihukum Mati

Yoon bisa ditahan selama berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan atau lebih lama.

Badan antikorupsi, yang memimpin penyelidikan bersama dengan polisi dan militer mengenai apakah deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon merupakan upaya pemberontakan, memiliki waktu 48 jam untuk meminta perintah pengadilan untuk penangkapan resminya.

Jika gagal melakukannya, Yoon

akan dibebaskan. Jika Yoon ditangkap secara resmi, penyidik dapat memperpanjang masa penahannya hingga 20 hari, sebelum melimpahkan kasusnya ke jaksa untuk didakwa.

Jika jaksa mendakwa Yoon atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, yang merupakan tuduhan yang diperiksa oleh penyidik, dia mungkin akan tetap ditahan sampai keputusan pengadilan awal. “Biasanya dilakukan dalam waktu enam bulan, kata Park Sung-bae, seorang pengacara yang berspesialisasi dalam hukum pidana.

Berdasarkan hukum Korea Selatan, pemimpin pemberontakan dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup, jika terbukti bersalah.

“Jika pengadilan pertama menjatuhkan hukuman penjara, penahanan akan dilanjutkan,” kata Park. “Jika mereka menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, misalnya, dia akan terus menjalani hukuman tersebut.”

Menteri Pertahanan Yoon, kepala polisi dan beberapa komandan militer telah ditangkap karena peran mereka dalam penegakan darurat militer.

Surat perintah penahanan terhadap Yoon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Seoul Barat, menyatakan ada alasan kuat untuk mencurigai bahwa ia melakukan kejahatan sebagai “pemimpin pemberontakan.”

Badan antikorupsi mengatakan kepada wartawan bahwa Yoon, selama beberapa jam pemeriksaan hingga Rabu malam, menggunakan kekuasaannya sebagai

SEDERET KONTROVERSI PRESIDEN KORSEL YOON SUK YEOL

3-12-2024
Presiden Korea Selatan/Korsel Yoon Suk Yeol Umumkan Martial Law atau Darurat Militer pada Pukul 22.23 Waktu Setempat, tapi 6 Jam Kemudian Dibatalkan Majelis Nasional/Parlemen

21-8-2024
Jaksa di Distrik Seoul Bebaskan Ibu Negara, Kim Keon Hee, dari Tuduhan Pidana Terkait Penerimaan Tas Mewah Usai Pernyataan Presiden Yoon Sebut Tuduhan terhadap Istrinya Itu Aksi Politik Murahan

3-2-2024
Keluarga Korban Tragedi Perayaan Halloween di Itaewon, Gelar Unjuk Rasa, karena Presiden Yoon Memveto Rancangan Undang-Undang/ RUU Khusus untuk Penyelidikan Baru terhadap Tragedi Itaewon yang Tewaskan 159 Orang pada 31 Oktober 2022

5-1-2024
Presiden Yoon Memveto RUU Penyelidikan Khusus terhadap Istrinya, Kim Keon Hee, dalam Dugaan Keterlibatan Manipulasi Saham

presiden ditangguhkan ketika parlemen memakzulkannya pada 14 Desember. Kasus pemakzulan kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang secara resmi dapat mencopot Yoon dari jabatannya atau menolak kasus tersebut dan mengembalikannya ke jabatannya.

Dalam pesan terpisah yang diposting di akun Facebook-nya setelah dia ditahan, Yoon mengatakan bahwa “darurat militer bukanlah sebuah kejahatan.” Ia menyatakan bahwa deklarasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang oposisi yang menjalankan “kediktatoran legislatif dengan memblokir undang-undang dan anggaran” dan “melumpuhkan” urusan negara.

Dia membantah tuduhan pemberontakan tersebut, dan menggambarkan pemakzulannya sebagai “penipuan.” (Irish News, afp, ist, wid/dya)



Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol saat ditangkap. (Afp)